

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan bidang sosial budaya yang diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia. Pembangunan bidang kesehatan diprioritaskan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH), penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui :

1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Balita
2. Perbaikan Status Gizi Masyarakat
3. Pengendalian Penyakit Menular serta Penyakit Tidak Menular Dan Penyehatan Lingkungan
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan
5. Ketersediaan, Pemerataan, Mutu dan Penggunaan Obat dan Makanan
6. Pengembangan Sistem Jaminan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana dan Krisis Kesehatan
8. Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan

Sebagai gambaran kegiatan dan permasalahan pembangunan kesehatan di Kota Cirebon diantaranya :

1. Penyebaran tenaga kesehatan belum merata, penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensinya.
2. Sarana pelayanan kesehatan belum semuanya terakreditasi.
3. Sebagian pelayanan kesehatan belum semuanya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan belum ada evaluasi pelaksanaannya.
4. Sistem rujukan belum berjalan optimal berdasarkan jenjang dan regionalisasi rujukan.
5. Fasilitas pelayanan kesehatan belum seluruhnya dilengkapi dengan sarana pengolahan limbah.
6. Belum semua penduduk miskin masuk dalam data kepesertaan program Jamkesmas atau Penerima Bantuan Iuran (PBI).

7. Belum optimalnya kemitraan dengan sektor terkait dalam pendataan penduduk miskin.
8. Kurangnya sumberdaya baik dana maupun tenaga kesehatan yang ada di sarana pelayanan kesehatan dasar.
9. Kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan dan lingkungan sekitarnya.
10. Koordinasi baik lintas program maupun lintas sektoral dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan di Kota Cirebon belum optimal.
11. Masih ada kebijakan yang kurang selaras antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam bidang kesehatan.

Strategi yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya adalah :

1. Peningkatan PHBS di semua tatanan.
2. Peningkatan upaya pembudayaan hidup bersih dan sehat serta pencegahan penyakit berbasis lingkungan.
3. Peningkatan upaya pelayanan kesehatan ibu, anak dan Keluarga Berencana.
4. Peningkatan status gizi masyarakat.
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui PHN (*Public Health Nursing*), Pokja Siaga Aktif dan RSBM.
6. Peningkatan upaya pengendalian masalah kesehatan.
7. Peningkatan perlindungan kepada masyarakat dari makanan tidak layak konsumsi/mengandung bahan berbahaya.
8. Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan.
9. Peningkatan ketersediaan, kelengkapan dan tata kelola sarana kesehatan.
10. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya tenaga kesehatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih

Perencanaan pembangunan Kota Cirebon harus lebih menitik beratkan pada peningkatan kualitas penduduk sebagai subjek dan objek pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur dimensi pembangunan manusia dengan indeks kesehatan, pendidikan dan daya beli. Indeks Pembangunan Manusia di

Kota Cirebon pada Tahun 2011 adalah 75,52 peringkat ke-6 di Provinsi Jawa Barat dan 76,42 pada Tahun 2012. Indikator kesehatan diukur dengan menilai angka harapan hidup, yang memiliki keterkaitan dengan variable lain, seperti angka kesakitan (*morbiditas*), angka kematian (*mortalitas*), pelayanan kesehatan dasar, sanitasi perumahan dan lingkungan serta variabel lainnya.

Dalam upaya mewujudkan pembangunan di Kota Cirebon 2013-2018 memiliki visi yaitu “Terwujudnya Kota Cirebon yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif, Hijau (RAMAH) pada Tahun 2018”. Dijabarkan ke dalam 6 misi, dan salah satu misinya yaitu misi ke 4 adalah “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon Pada Sektor Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan yang Berbasis Pada Budaya dan Kearifan Lokal”.

Sejalan dengan visi misi Kota Cirebon 2013-2018 diharapkan dapat dirumuskan kebijakan dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat Kota Cirebon. Penjabaran visi misi Kota Cirebon 2013-2018 dalam upaya pembangunan di sektor kesehatan adalah :

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
2. Meningkatkan usia harapan hidup.
3. Penanggulangan penyakit menular, penyakit musiman dan penyakit berbasis lingkungan lainnya secara komprehensif.
4. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat.
5. Meningkatkan jaminan kesehatan masyarakat.
6. Perawatan kesehatan masyarakat (*home visite*).
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur kesehatan.

Untuk mempercepat keberhasilan pembangunan tersebut, diharapkan sinergitas dengan lintas program dan lintas sektor terkait. Karena keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kinerja sektor kesehatan saja, kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, masyarakat, pemerintah dan swasta. Perilaku yang sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan. Untuk pencapaian target kesehatan yang tertuang dalam RPJMD Kota Cirebon 2013-2018, harus

mengevaluasi efektivitas kinerja seluruh sumber daya dalam upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Penetapan target yang realistis dan terukur untuk kegiatan yang berorientasi pada masyarakat, dengan mengacu pada garis besar program Visi Misi Walikota Cirebon 2013-2018 yaitu :

1. Peningkatan peran tokoh agama dan organisasi keagamaan sebagai simpul promosi kesehatan.
2. Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat.
3. Biaya administrasi Puskesmas gratis bagi warga Kota Cirebon.
4. Peningkatan fasilitasi dan bantuan bagi Posyandu, promosi KB dan kadernya.
5. Pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kesehatan masyarakat.
6. Optimalisasi perawatan kesehatan masyarakat (*home visite*).

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kesehatan

Kebijakan dan strategi nasional untuk pembangunan kesehatan diarahkan pada tersedianya akses kesehatan dasar yang terjangkau dan berkualitas terutama pada kelompok menengah ke bawah untuk mendukung pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs). Untuk sasaran pembangunan kesehatan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan antara lain dengan meningkatnya angka harapan hidup, menurunkan tingkat kematian bayi dan kematian ibu melahirkan.

Sistem Kesehatan Nasional adalah suatu tatanan yang mencerminkan upaya Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kemampuannya mencapai derajat kesehatan yang optimal. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam Sistem Kesehatan Nasional adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bermutu, merata, dan terjangkau oleh masyarakat secara ekonomis, serta tersedianya pelayanan kesehatan dengan mengikutsertakan sebesar-besarnya peran aktif segenap anggota masyarakat.

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan program pembangunan kesehatan

yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu Tahun 2010-2014. dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *Millenium Development Goals* (MDGs).

Kementerian Kesehatan telah menetapkan Visi dan Misi Rencana Strategis yang ingin dicapai adalah “Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan“. Visi ini dituangkan menjadi 4 misi yaitu : (1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani, (2) Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan, (3) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan, serta (4) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Visi dan Misi ini akan diwujudkan melalui 6 Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014, yaitu:

1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama nasional dan global.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti, dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif.
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional.
4. Meningkatkan pengembangan dan pendayagunaan SDM kesehatan yang merata dan bermutu.
5. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan.
6. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaan kegiatan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan kesehatan Kota Cirebon ditinjau dari sasaran Rencana Strategis Kementerian Kesehatan adalah :

a. Faktor Pendorong

- Adanya Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Kota Cirebon.
- Adanya Peraturan Daerah maupun Keputusan Walikota tentang kewenangan bidang kesehatan dan Standar Pelayanan Minimal.
- Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon untuk meningkatkan pembangunan bidang kesehatan.
- Tersedianya sarana pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan baik pemerintah maupun swasta.
- Tersedianya institusi pendidikan tenaga kesehatan pemerintah maupun swasta.
- Adanya LSM yang peduli dengan kegiatan pelayanan kesehatan.

b. Faktor Penghambat

- Penyebaran tenaga kesehatan belum merata, penempatan pegawai belum sesuai dengan kompetensinya.
- Sarana pelayanan kesehatan belum semuanya terakreditasi.
- Sebagian pelayanan kesehatan belum semuanya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan belum ada evaluasi pelaksanaannya.
- Sistem rujukan belum berjalan optimal.
- Fasilitas pelayanan kesehatan belum seluruhnya dilengkapi dengan sarana pengolahan limbah.
- Belum adanya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota terkait jaminan pelayanan bagi seluruh penduduk kota.
- Belum semua penduduk miskin masuk dalam data kepesertaan program Jamkesmas atau Penerima Bantuan Iuran (PBI).
- Belum optimalnya kemitraan dengan sektor terkait dalam pendataan penduduk miskin.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan infrastruktur Kota Cirebon mengalami perkembangan yang sangat berarti dengan bermunculannya supermarket di berbagai wilayah Kota Cirebon. Kota Cirebon berdasarkan keadaan geografis dan perkembangan pembangunan terbagi atas 4 daerah / kawasan yang cukup

dominan yaitu : daerah industri yang terdapat di wilayah Kelurahan Pegambiran, daerah pantai terdapat di Kelurahan Kesenden, Kesepuhan dan Lemahwungkuk, daerah perkotaan terdapat di Kelurahan Pekalipan, Pekalangan, Kejaksan, Pekiringan dan Kesambi. Sedangkan Kelurahan yang terbanyak RW kumuhnya adalah Kelurahan Pegambiran dengan jenis kumuh pantai dan daerah industri, Kelurahan Kesambi (4 RW) termasuk kumuh perkotaan dan daerah kumuh sisi kota yaitu Kelurahan Argasunya, Kalijaga dan Karyamulya, untuk daerah lainnya merupakan semi perkotaan.

Untuk daerah rawan bencana KLB di Kota Cirebon untuk KLB diare dan bencana alam sering terjadi di wilayah Kelurahan Argasunya dan Kalijaga, untuk KLB Campak dan DBD di wilayah Kelurahan Kecapi dan Larangan, sedangkan untuk KLB ISPA terjadi di wilayah Kelurahan Pegambiran yang merupakan kawasan industri. Selain itu Kota Cirebon merupakan daerah penghubung antara Jawa Barat dan Jawa Tengah , sehingga arus lalu lintas banyak yang melalui Kota Cirebon, hal ini menyebabkan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Cirebon cukup tinggi.

Dalam pelaksanaan kegiatan faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan kesehatan ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Cirebon adalah :

a. Faktor Pendorong

- Adanya sarana transportasi darat (akan di bangunnya jalan tol Cisundawu dan Jalur dobel trek kereta api), laut (Pelabuhan Muara Jati) dan udara (akan di bangunnya Bandara Internasional di Majalengka) hal tersebut dapat yang meningkatkan mobilitas penduduk di Kota Cirebon dan sekitarnya.
- Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Cirebon dengan laju pertambahan penduduk $\pm 0,8$ % pertahun.
- Meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kota Cirebon dan sekitarnya.

- Jumlah sarana dan prasarana kesehatan di pelayanan dasar yang ada sudah tersebar di wilayah Kota Cirebon.

b. Faktor Penghambat

- Kurangnya sumberdaya baik dana maupun tenaga kesehatan yang ada di sarana pelayanan kesehatan dasar.
- Kurangnya kepedulian masyarakat dalam menjaga kesehatan dan lingkungan sekitarnya.
- Koordinasi baik lintas program maupun lintas sektoral dalam upaya penanggulangan masalah kesehatan di Kota Cirebon belum optimal.
- Masih ada kebijakan yang kurang selaras antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam bidang kesehatan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pembangunan kesehatan tidak ditentukan oleh hasil kerja dari sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja sektor lain. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional dapat bersinergi secara dinamis dengan berbagai sistem lainnya.

Dalam penentuan isu-isu strategis dengan metode SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) sehingga diperoleh informasi faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan kesehatan ditinjau dari gambaran pelayanan kesehatan, sasaran jangka menengah Rencana Strategi Kementerian Kesehatan, implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Cirebon adalah :

1. Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*).
2. Masih tingginya kematian ibu, bayi dan batita.
3. Penanggulangan masalah Gizi (gizi buruk, gizi kurang dan gizi berlebih).
4. Pembangunan masyarakat yang ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat sebagai budaya dan karakter masyarakat.
5. Pemberantasan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit potensi re-emerging serta pengendalian penyakit tidak menular.

6. Upaya pelayanan kesehatan harus terstandarisasi, berjenjang dan komprehensif serta profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.
7. Hygiene dan Sanitasi di setiap tatanan kehidupan masyarakat.
8. Sistem Kesehatan Daerah Kota Cirebon, sistem pembiayaan dan jaminan kesehatan.